



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

Siti Latifah El Husna M^{1*}, Taufeni Taufik², Nita Wahyuni³
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Riau, Pekanbaru

*corresponding author: Siti.latifah1936@student.unri.ac.id

Abstract

This research aims to examine the influence of regional complexity, regional government size, economic growth, capital expenditure, local original income, on the weaknesses of the government's internal control system in districts/cities in Riau province in 2013-2022. The population in this study consists of Regencies/Cities in the Riau province from 2013 to 2022, totaling 12 regencies/cities with a 10-year observation period, resulting in a population count of 120. The sampling technique used in this research is purposive sampling, with a total of 33 samples obtained. The sampling was determined in advance based on criteria, the samples taken were districts/cities in Riau Province that did not obtain an Unqualified Opinion (WTP) from the Financial Audit Agency (BPK) in 2013-2022. The data analysis method used in this research employs multiple regression analysis, utilizing the SPSS data processing software version 26. The results of this study indicate that regional complexity, the size of local government, economic growth, and local revenue have an influence on the weaknesses of the internal control system of the government. Capital expenditure does not affect the weaknesses of the internal control system of the government.

Keywords: *Complexity, Size, Economic Growth, Capital Expenditure, Local Revenue, Government's Internal Control System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, pendapatan asli daerah, terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah pada kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2013-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di provinsi Riau tahun 2013-2022 yang berjumlah 12 kabupaten/kota dengan 10 tahun pengamatan sehingga jumlah populasi menjadi 120. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 33. Penentuan sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kriteria, sampel yang di ambil adalah Kabupaten/kota di Provinsi Riau yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013-2022. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dengan menggunakan software pengolah data SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.

Kata Kunci : *Kompleksitas, Ukuran, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*

Informasi Artikel

Diterima : 01/11/2024
Review Akhir : 06/11/2024
Diterbitkan online : 11/2024

PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses yang sistematis untuk melaksanakan kegiatan, implementasi berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh karyawan. Tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan kekayaan negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 602008.

Pengamanan aset daerah adalah bagian penting pemerintah dan masyarakat, karena bila terjadi keteledoran dalam pengamanan aset dapat mengakibatkan terjadinya pencurian, penggelapan maupun bentuk manipulasi lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat merugikan instansi pemerintah dan masyarakat, maka dari itu diperlukan pengendalian yang kuat, setiap instansi pemerintah harus menumbuhkan dan menjaga lingkungan pengendalian yang baik sehingga dapat memunculkan perilaku positif dalam manajemen yang sehat (Mardatilla, 2019)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan selama tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat peningkatan kelemahan sistem pengendalian internal yang mana terdapat 1.118 permasalahan meningkat menjadi 7.020 permasalahan. Dari data tersebut di kota/kabupaten provinsi Riau juga terdapat banyaknya temuan kasus terjadinya kelemahan pada sistem pengendalian internal.

Tabel 1 Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Kabupaten/Kota di provinsi Riau tahun 2013-2022

NO	Kelompok Temuan SPIP	Tahun									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	45	53	48	50	26	23	29	56	59	57
2.	kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran	43	36	46	37	30	19	23	49	55	53
3.	Kelemahan struktur pengendalian internal	38	39	40	40	25	16	18	40	57	58
	Jumlah	126	128	134	127	81	58	70	145	171	168

Sumber: BPK RI, 2023

Dari tabel di atas dapat terlihat masih banyak temuan kelemahan sistem pengendalian internal pada kabupaten/Kota di provinsi Riau selama 10 tahun terakhir ini. Hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Riau tahun 2021 dan 2022 mengungkapkan temuan kelemahan sistem pengendalian internal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 kelompok temuan.

Masalah yang pertama terkait dengan kelemahan yang terjadi dalam sistem pengendalian internal pemerintah pada akuntansi dan pelaporan, seperti realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai kondisi senyatanya dan melebihi standar yang ditetapkan, kemudian pelaporan penggunaan dana hibah oleh para penerima belum dilaksanakan sesuai ketentuan pelaporan penggunaan dana hibah, lalu rekening BLUD belum ditetapkan kepala daerah dan bunga rekening bank pemerintah dikenakan pajak serta penatausahaan utang belanja dan utang jangka pendek lainnya belum tertib.

Masalah kedua terkait dengan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, diantaranya kesalahan penganggaran jenis belanja modal, dan belanja barang/jasa pada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemerintah belum sepenuhnya menerima bagi hasil keuntungan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk bangun guna serah, Pertanggungjawaban belanja barang dan jasa pada sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi senyatanya, kemudian pengadaan peralatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk sekolah dasar negeri pada dinas pendidikan tidak sesuai ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa.

Masalah ketiga terkait dengan kelemahan struktur pengendalian internal, yaitu realisasi belanja pegawai tidak sesuai ketentuan tentang tata cara pemberian dan penghentian hak kepegawaian,; lalu

adanya kelebihan perhitungan kontrak dan ketidaksesuaian kriteria teknis pada pekerjaan jasa angkutan persampahan, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat belum didukung berita acara serah terima dan adanya kekurangan volume pada tujuh paket pekerjaan jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta pengelolaan dana BOS pada pemerintah belum tertib.

Pelaksanaan pengendalian internal yang tidak optimal akan menyebabkan terjadinya kelemahan pengendalian internal, dapat ditemukan pada organisasi/instansi yang memiliki operasi yang lebih kompleks, ukuran lebih kecil dan kurang menguntungkan. Pernyataan tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 18 ayat 1 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Pertama yaitu kompleksitas daerah. Kompleksitas daerah adalah tingkat diferensiasi yang ada di pemerintah daerah sehingga dapat menyebabkan konflik atau masalah dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini didasarkan pada persepsi yang berbeda setiap individu tentang kesulitan menerima suatu tugas atau pekerjaan yang telah diamanahkan. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar maka semakin sulit pengendalian internal jalankan (Pamuji, 2017).

Penelitian yang dilakukan Pamuji (2017) menjelaskan bahwa Kompleksitas daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Sedangkan penelitian yang dilakukan Saferi dan Mulyani (2020) menjelaskan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah pada kota/kabupaten di Sumatera Barat tahun 2014-2017. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mahmud (2015) juga menyatakan bahwa kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah.

Faktor kedua adalah ukuran pemerintah, ukuran pemerintah dapat mempengaruhi kerentanan pengendalian internal (Putri dan Mahmud, 2015). Ukuran sebuah entitas dapat dijadikan sebuah gambaran secara umum yang bisa dilihat secara fisik luar organisasi. Organisasi mempunyai ukuran besar di indikasikan memiliki kemapanan ekonomi sehingga mampu mengembangkan serta mengimplementasikan pengendalian internal dengan baik. Ukuran dalam satu organisasi juga memperlihatkan tingkatan aktivitas yang ada di dalamnya (Andesti dan Agustin, 2022).

Berdasarkan penelitian Andesti dan Agustin (2022) ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah, dimana semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin rendah temuan terkait kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah di daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan Majid et al., (2017) menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Saferi dan Mulyani (2020) dan juga penelitian Alawiyah et al., (2020) menjelaskan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya ialah pertumbuhan ekonomi, adapun ukuran yang dapat digunakan dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat laju *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) pada masing masing daerah. Dalam menggerakkan aktivitas perekonomian suatu daerah, pemerintah memiliki peran yang krusial untuk mendorong peningkatan aktivitas perekonomian sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dengan melakukan perencanaan dan pembaharuan program yang dirancang, menetapkan kebijakan yang sesuai, mengalokasikan belanja dengan memprioritaskan pada sektor ekonomi yang produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta melakukan pengawasan yang baik (Majid et al., 2017). Dalam mengurangi resiko yang dapat terjadi akibat pertumbuhan ekonomi pemerintah akan berusaha meningkatkan pengendalian internal dengan merumuskan pendekatan manajemen risiko dan melakukan penyesuaian pada kegiatan pengendalian dengan penetapan prosedur pengendalian yang baru dan tepat yang berorientasi pada tujuan (Hartono, et al, 2014).

Berdasarkan penelitian Putri dan Mahmud (2015) dan Dini et al., (2020) menjelaskan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan penelitian yang

dilakukan Saferi dan Mulyani (2020) menjelaskan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi lemahnya sistem pengendalian Internal yaitu belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan keuntungan atau manfaat selama beberapa periode akuntansi. Belanja modal meliputi modal yang digunakan untuk membeli aset tetap pemerintah daerah, seperti peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya (PP 71 Tahun 2010). Belanja modal sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang fisik atau aset tetap. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset tetap semakin tinggi. Proyek pengadaan barang ini yang sangat rawan terjadi kecurangan yang merugikan dapat pemerintah (Iqbal, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rachmawati (2016) menjelaskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Kiswanto et al., (2020) dan juga penelitian Alawiyah et al., (2020) menjelaskan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal lainnya adalah pendapatan asli daerah. Untuk mendanai konsumsi daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tentunya mempunyai peranan utama dalam sumber pendanaan dan pembiayaan daerah, apabila dalam suatu daerah mempunyai Pendapatan asli daerah yang besar maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin bagus (Putri dan Mahmud, 2015). Pendapatan asli daerah mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah karena pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar dalam mengelola daerah termasuk pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau pendapatan daerah yang sah, dengan adanya kewenangan yang dimiliki dan besarnya dana yang dikelola berdampak terjadinya penyimpangan keuangan daerah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan tingginya kelemahan sistem pengendalian internal di pemerintah daerah (Majid *et al.*, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2017), Majid et al.,(2017) dan Pamuji (2017) menyatakan PAD berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian Puspitasari (2013), Hartono (2014), dan Sutomo (2018) tidak menemukan adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian internal telah banyak dilakukan sebelumnya namun masih terdapat ketidak konsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga menarik untuk dilakukannya penelitian kembali. Dengan demikian peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di provinsi Riau 2013-2022)

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori agensi adalah sebuah teori yang menjelaskan hubungan atau kontrak antara principal dan agen, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agen dalam melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal. Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan yang muncul ketika satu atau lebih orang (*principal*) membuat kontrak dengan pihak lain (agen) untuk memberikan jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976).

Hubungan keagenan dalam pemerintahan daerah dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Menurut teori keagenan, pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai agen, mengupayakan penggunaan pengendalian internal yang optimal untuk memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan pemerintah untuk mengelola daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga dapat mengurangi timbulnya *information asymmetry*. Sekaligus mengurangi tindak kecurangan dan penyelewengan yang disebabkan berkurangnya *information asymmetry* (Puspitasari, 2013).

Stakeholder Theory

Stakeholder theory menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholdernya dalam memenuhi kewajibannya. Perusahaan dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan Aifin (2016) dalam Subowo (2020). Teori *Stakeholder* digunakan untuk mendasari pemilihan variabel ukuran pemerintah daerah sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal. Pemerintah daerah dengan ukuran besar akan memiliki banyak sumber daya yang besar untuk membantu menjalankan tugasnya. besarnya sumber daya yang dimiliki akan meningkatkan risiko peyelewan. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah menerima tuntutan yang lebih besar dari pemangku kepentingan atau stakeholder dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan (Hartono *et al.*, 2014).

Pengaruh kompleksitas daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Pengukuran yang digunakan dalam menentukan kompleksitas daerah yaitu total SKPD (Rachmawati, 2016). Pemerintah daerah yang mempunyai satuan kerja banyak hendaknya mengimplementasikan pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah dengan satuan kerja sedikit, sehingga temuan atas kelemahan pengendalian internal dapat berkurang. Semakin banyak jumlah satuan kerja yang dimiliki maka semakin kompleks entitas tersebut sehingga semakin banyak informasi yang harus diungkapkan sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi dalam menunjukkan kinerja yang semakin baik. (Khasanah dan Rahardjo, 2014).

Kompleksitas pemerintah daerah juga dapat diukur berdasarkan jumlah kecamatan yang tersebar. Banyaknya jumlah kecamatan yang ada di suatu daerah juga akan membebani tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pengawasan. Selain itu banyaknya jumlah kecamatan maka semakin banyak informasi yang diungkapkan pada saat pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah (Mustafa dan Mahyus, 2017). Tingkat kompleksitas yang tinggi memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengendalian internal agar dapat mengatasi asimetri informasi dan meningkatkan kinerjanya

Berdasarkan hasil penelitian Saferi dan Mulyani (2020) menyatakan bahwa kompleksitas daerah yang diukur dengan menggunakan jumlah SKPD berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Hal ini dikarenakan Pemerintah telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah baik Pusat, Provinsi serta Kabupaten/ Kota. berikut adalah hipotesis penelitian:

H₁ : Terdapat Pengaruh Kompleksitas daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Ukuran pemerintahan daerah merupakan skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan pemerintah daerah yang diukur dari total asetnya. Total aset yang besar akan mendukung pemerintah daerah dalam upaya memenuhi tanggung jawabnya kepada publik. Karenanya pemerintah daerah yang memiliki aset dalam jumlah besar akan disadarkan untuk meningkatkan pengawasan yang baik melalui penerapan sistem pengendalian internal yang optimal untuk menjaga keamanan aset yang dimiliki dari segala bentuk kecurangan agar upaya untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat dapat tercapai (Hartono *et.* al 2014). Berikut adalah hipotesis penelitian:

H₂ : Terdapat Pengaruh Ukuran Pemerintah daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Kegiatan ekonomi yang baik akan berdampak pada berkurangnya kasus-kasus pada kelemahan pengendalian internal (Iqbal, 2017). Mendukung teori keagenan dimana makin tinggi pertumbuhan ekonomi yang didapatkan oleh suatu

daerah maka semakin tinggi juga tanggungjawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian internal. (Pasha, 2022). berikut adalah hipotesis penelitian:

H₃ : Terdapat Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Pengaruh Belanja Modal terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Dalam Aini (2017) menyebutkan belanja modal yang dimiliki suatu daerah merupakan alokasi untuk pengadaan aset tetap. Pengadaan aset tetap ini yang sangat rawan terjadi kecurangan yang dapat merugikan pemerintah. Anggaran belanja modal yang besar apabila tidak disertai dengan pengendalian internal yang baik maka akan banyak terjadi penyalahgunaan belanja modal sebagai objek korupsi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengendalian internal pemerintah yang berbentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan belanja modal. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah maka alokasi untuk pengadaan aset semakin tinggi sehingga harus dimbangi dengan sistem pengendalian yang efektif (Novilia, 2017). Berikut adalah hipotesis penelitian:

H₄ : Terdapat Pengaruh Belanja Modal terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Pengaruh Belanja Modal terhadap kelemahan sistem pengendalian internal PAD ialah pendapatan daerah yang berasal dari daerahnya sendiri didapatkan dari mengelola dan memanfaatkan potensi pada daerahnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut dimana PAD mempunyai pengaruh negatif pada kelemahan pengendalian intern maka berarti tingginya PAD memungkinkan pengendalian intern nya dapat berjalan secara lebih baik (Safitri & Kiswanto, 2019) adalah hipotesis penelitian:

H₅ : Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang telah diaudit BPK. Waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di provinsi Riau tahun 2013-2022 yang berjumlah 12 kabupaten/kota dengan 10 tahun pengamatan sehingga jumlah populasi menjadi 120. Penelitian ini menggunakan sampel dengan kriteria sampel yang diambil adalah Kabupaten/Kota di provinsi Riau yang tidak memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 2013-2022. Terdapat 33 sampel dalam penelitian ini yang memenuhi syarat kriteria yang telah ditetapkan untuk memilih sampel. *Purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel untuk penelitian ini.

Tabel 2. Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah kabupaten/kota di provinsi riau 2013-2022	120
2	Kabupaten/Kota di provinsi Riau yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK 2013-2022	(87)
3	Objek penelitian dengan data yang lengkap	33
	Jumlah sampel penelitian	33

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui dokumen dan situs yang terkait dengan penelitian ini seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bada Pusat Statistik (BPS) tahun

2013-2022. Laporan-laporan tersebut dapat diakses di www.bpk.go.id dan www.bps.go.id beserta kajian literatur dari buku, jurnal, dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan dan dokumen data yang diperoleh dari buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.
2. Mengakses web atau situs-situs yang terkait untuk mendapatkan data seperti dokumen mengenai laporan keuangan yang diperlukan.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

No	Variabel	Indikator
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah(Y)	Jumlah temuan kasus BPK atas kelemahan sistem pengendalian internal. Pengukuran = Total temuan kasus SPI (Putri&Mahmud, 2015)
2.	Kompleksitas daerah (X1)	Total SKPD pada wilayah. Pengukuran = Total SKPD (Rachmawati, 2016)
3.	Ukuran Pemerintah Daerah(X2)	Total Aset dalam neraca pada LKPD yang telah diaudit BPK. Pengukuran= $\ln(\text{Total Aset})$ (Saferi&Mulyani, 2020)
4.	Pertumbuhan Ekonomi (X3)	Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengukuran= $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ (Majid, <i>et al</i> , 2017).
5.	Belanja Modal (X4)	Jumlah realisasi belanja modal. Pengukuran= $\frac{\text{jumlah Belanja Modal}}{\text{jumlah Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Subowo,2020)
6.	Pendapatan Asli Daerah (X5)	Jumlah PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran pada LKPD yang telah diaudit BPK. Pengukuran= $\frac{\text{jumlah PAD}}{\text{jumlah pendapatan}} \times 100\%$ (Saputro, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini nilai yang digunakan untuk memberikan gambaran (deskriptif) seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan pendapatan asli daerah dan kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Berikut hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan dalam tabel

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	33	5,000	22,000	11,93	4,152
Kompleksitas Daerah	33	35,000	57,000	47,8788	6,431
Ukuran Pemerintah Daerah	33	2.772.393.302.303	13.175.586.760.042	5.533.208.610.317	2.464.453.147.006
Pertumbuhan Ekonomi	33	-3,80	7,10	3,3591	2,94876

Belanja Modal	33	0,13	0,49	0,2467	0,073
Pendapatan Asli Daerah	33	0,04	0,32	0,1021	0,073
Valid (listwise)	N 33				

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
N	Unstandardized Residual 33
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Nilai signifikansi adalah 0,20. artinya data berdistribusi normal yang mana nilai signifikansi untuk residual tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

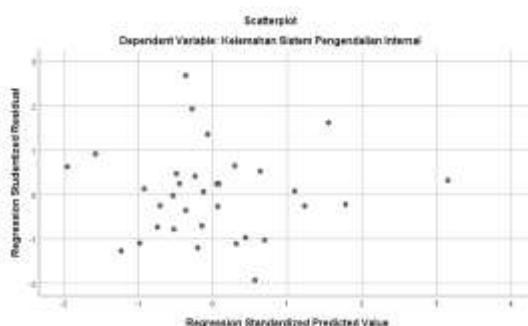
Tabel 6. Pengujian Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompleksitas Daerah	0,711	1,406
	Ukuran Pemerintah Daerah	0,522	1,914
	Pertumbuhan Ekonomi	0,743	1,346
	Belanja Modal	0,611	1,637
	Pendapatan Asli Daerah	0,612	1,634

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, setiap variabel bernilai *Tolerance* > 0,1 dan bernilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10. Sehingga kesimpulannya semua variabel telah terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Pengujian Heteroskedastisitas
Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Uji Autokorelasi

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan data-data telah tersebar acak dibawah nilai 0, diatas nilai 0 dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dalam penelitian ini, model regresi sudah homoskedastisitas.

Tabel 7. Pengujian Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2.030
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Kompleksitas Daerah	
b. Dependent Variable: Kelemahan Sistem Pengendalian Internal	

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa syarat regresi bebas dari autokorelasi yaitu nilai $du < DW < 4 - du$ yang mana dalam penelitian ini diperoleh nilai $1,8128 < 2,030 < (4 - 1,8128 = 2,1872)$ dan dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Pengujian Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4,707	5,272		-0,893	0,380
	Kompleksitas Daerah	,365	0,087	0,577	4,187	0,000
	Ukuran Pemerintah Daerah	-8,195E-13	0,000	-0,340	-2,240	0,034
	Pertumbuhan Ekonomi	-0,419	0,200	-0,284	-2,099	0,045
	Belanja Modal	3,488	8,606	0,062	0,405	0,688
	Pendapatan Asli Daerah	18,485	8,694	0,329	2,126	0,043

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada Tabel 5.6, didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

$$\text{Kelemahan SPIP} = -4,707 + 0,365 X_1 - 8,195 X_2 - 0,419 X_3 + 3,488 X_4 + 18,485 X_5 + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,498	0,248	0,305	0,11951
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Kompleksitas				
b. Dependent Variable: Kelemahan SPIP				

Sumber: Data Olahan SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,305 atau 30,5% memberikan penjelasan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal dipengaruhi oleh Kompleksitas daerah , Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah, pada kabupaten/kota di provinsi riau tahun 2013-2022, sedangkan sisanya sebesar 69,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian yaitu jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompleksitas Daerah Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan tabel 8 hasil uji penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,365 dan *p-value* sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan *p-value* sebesar 0,000. yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 1 (H1) dapat diterima. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa kompleksitas berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,365 yang mengindikasikan hubungan searah, artinya peningkatan kompleksitas daerah diikuti dengan peningkatan kelemahan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi kompleksitas daerah, maka semakin tinggi kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini memberikan penjelasan bahwa kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Artinya kenaikan kompleksitas daerah akan berbanding lurus dengan temuan kelemahan pengendalian internal di daerah tersebut, semakin tinggi kompleksitas suatu daerah yang ditandai dengan banyaknya jumlah SKPD pada daerah tersebut maka akan menyebabkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada daerah tersebut juga meningkat. Adha, *et al.*, (2019) menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap kelemahan sistem pengendalian intern, dimana semakin kompleks suatu organisasi maka akan semakin sulit juga organisasi tersebut untuk mengimplementasikan tujuannya dalam menjalankan pengendalian intern pemerintah, yang dapat menyebabkan meningkatnya masalah kelemahan pengendalian internal pada organisasi tersebut. Adapun alasan yang mendasari hal di atas ialah, jika kompleksitas itu semakin tinggi ditandai dengan letak area kerja yang tersebar pada pemerintah daerah tersebut maka kegiatan yang akan dikendalikan oleh pemda juga semakin banyak dan beragam, dimana hal tersebut menyebabkan pengendalian internal yang dijalankan semakin kompleks karena ruang lingkup pemerintahan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian menjadi semakin luas, sehingganya akan memberikan tantangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengimplementasikan sistem pengendalian intern. Selain itu tingginya kompleksitas yang terdapat pada suatu daerah mengakibatkan tingkat pengawasan terhadap pengendalian internal yang dijalankan juga menjadi rendah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Banyaknya kegiatan yang dikendalikan oleh pemda yang memiliki latar belakang berbeda menimbulkan terjadinya perbedaan beberapa prosedur pengelolaan keuangan pada setiap kecamatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga pemda mengalami kesulitan dalam melakukan konsolidasi laporan keuangan dari berbagai kecamatan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adha, *et al.*, (2019), Yaya dan Halim (2019), dan Hartono *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa kompleksitas berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal, kompleksitas yang tinggi akan berakibat terhadap peningkatan masalah kelemahan sistem pengendalian intern yang diterapkan di daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan Safery dan Mulyani (2020). Putri dan Mahmud (2015) menyatakan bahwa kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan tabel 8 hasil uji penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar -8,195 dan *p-value* sebesar 0,034. Hasil tersebut menunjukkan *p-value* sebesar 0,034. yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 2 (H2) dapat diterima. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan nilai koefisien bernilai negatif sebesar -8,195 yang mengindikasikan hubungan berbalik arah, artinya peningkatan ukuran pemerintah daerah tidak diikuti dengan peningkatan kelemahan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi ukuran pemerintah daerah, maka semakin rendah kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.

Berdasarkan teori agensi, pihak principal mendelegasikan suatu pekerjaan kepada pihak agen yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dalam organisasi pemerintahan, rakyat memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen untuk menjalankan tugas pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin besar ukuran pemerintah maka semakin besar pula tuntutan rakyat untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap sebagai upaya peningkatan transparansi dan mengurangi asimetri informasi.

Dalam penelitian Adha *et al.*, (2019) menyatakan bahwa banyaknya jumlah aset yang dimiliki akan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan praktik sistem pengendalian internal yang baik sebagai pertanggungjawaban agen yang diberikan wewenang oleh *principal* untuk menjaga keutuhan aset-aset yang berada dalam pengawasannya. Berdasarkan teori *stakeholder* menjelaskan bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik agar berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk menjaga hubungan baiknya dengan masyarakat selaku *stakeholder*. Sumarjo(2010) dalam Artha, *et al.*, (2015) menjelaskan bahwa total aset yang besar akan mendukung pemerintah daerah dalam upaya memenuhi tanggung jawabnya kepada publik. Karenanya pemda yang memiliki aset dalam jumlah besar akan disadarkan untuk meningkatkan pengawasan yang baik melalui penerapan sistem pengendalian internal yang optimal untuk menjaga keamanan aset yang dimiliki dari segala bentuk kecurangan agar upaya untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat dapat tercapai (Hartono *et al.*, 2014) .

Pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar cenderung memiliki kelebihan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian internalnya. Pemerintah daerah tersebut memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat membantu mendesain pengendalian internal yang kuat. Sebaliknya, pemerintah dalam ukuran kecil memiliki kesulitan dalam mengevaluasi pengendalian internal dikarenakan belum mempunyai struktur yang formal atau struktur yang baik dalam pengendalian internal mereka. Pemerintah yang berukuran kecil cenderung mempunyai sumber daya yang terbatas, termasuk sumber daya yang dikhususkan untuk mendesain dan menerapkan pengendalian internal yang efektif. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menyadarkan pihak manajemen pemerintah terkait dengan peningkatan pengawasan terhadap aset. Pemerintah akan berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mengawasi aset daerahnya, sehingga mampu menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi. Sehingga dibutuhkan sebuah pengawasan internal yang baik terhadap aset agar dapat terjaga dengan baik. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) dan Hartono (2014) menemukan adanya hubungan yang negatif antara ukuran pemerintah terhadap kelemahan pengendalian internal. Organisasi yang besar juga memiliki sumber daya ekonomi yang lebih banyak untuk melakukan implementasi sistem pengendalian intern seperti melakukan training dan konsultasi sistem pengendalian internal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2017) menemukan adanya pengaruh ukuran pemerintah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adha *et al.*, (2019), Safitri dan Kiswanto (2019) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif pada kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Saferi dan Mulyani (2020) dan Alawiyah *et al.*, (2020) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

Berdasarkan tabel 8 hasil uji penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,419 dan *p-value* sebesar 0,045. Hasil tersebut menunjukkan *p-value* sebesar 0,045, yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 3 (H3) dapat diterima. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan nilai koefisien bernilai negatif sebesar -0,419 yang mengindikasikan hubungan berbalik arah, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan berkurangnya kelemahan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan teori keagenan peran pemerintah daerah selaku agen yang diberi mandat oleh *principal* (DPRD, masyarakat dan *stakeholder* lainnya) untuk mengingatkan kesejahteraan masyarakat yang tentunya dilakukan melalui gerakan pembangunan ekonomi. Untuk mendukung pembangunan ekonomi, selaku agen yang baik, yang bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Teori agensi berkaitan dengan masalah konflik keagenan antara pemilik (*principal*) dan agen (*agent*). Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah sering dianggap sebagai agen yang bertindak atas nama masyarakat atau pemilik daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipengaruhi oleh cara pemerintah mengelola sumber daya dan kebijakan-kebijakan ekonomi.

Menurut Hartono *et al.*, (2014), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai pemerintah daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Kegiatan ekonomi yang baik akan berdampak pada berkurangnya kasus-kasus pada kelemahan

pengendalian internal (Iqbal, 2017). Mendukung teori keagenan dimana makin tinggi pertumbuhan ekonomi yang didapatkan oleh suatu daerah maka semakin tinggi juga tanggungjawab yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam lingkup pengendalian internal. Jika suatu daerah tidak mampu melakukan pengelolaan dan pengawasan atas daerahnya maka daerah tersebut tidak mampu dalam menjalankan perintah *principal* untuk melakukan pengendalian internal yang baik yang mengakibatkan naiknya tingkat kelemahan pengendalian intern. Sebaliknya jika pemerintah dapat menjalankan pengelolaan perekonomian dengan baik maka jumlah kelemahan pengendalian internal dapat di minimalisir (Pasha, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khusniardi dan Jatmiko (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal, kenaikan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah akan mengurangi jumlah kasus terhadap kelemahan pengendalian internal. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah bisa mengatur atau memajemen pemerintah daerahnya agar mengurangi terjadinya masalah pengendalian internal. Selain itu, kenaikan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah juga dapat memperbaiki kualitas pengendalian internalnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2014) meunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah akan mengurangi jumlah kasus terhadap kelemahan pengendalian internal.

Hasil penelitian serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Majid *et al.*, (2017), Dini *et al.*, (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andesti dan Agustin (2022) dan Puspitasari (2013) menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan tabel 8 hasil uji penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar 3,488 dan *p-value* sebesar 0,688. Hasil tersebut menunjukkan *p-value* sebesar 0,688. yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 4 (H4) dapat ditolak. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan nilai koefisien bernilai positif sebesar 3,488 yang mengindikasikan hubungan searah, artinya peningkatan belanja modal tidak diikuti dengan peningkatan atau pengurangan kelemahan sistem pengendalian internal.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa besarnya belanja modal tidak dapat mempengaruhi temuan kelemahan pengendalian internal. Pada teori keagenan, pihak agen atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada pihak *principal*/masyarakat salah satunya melalui adanya kegiatan pengadaan aset tetap namun hasil penelitian ini menunjukkan belanja modal tidak dapat mempengaruhi jumlah permasalahan pada kelemahan pengendalian internal. Terdapat faktor lain diantaranya karena kurangnya kepedulian masyarakat atas pengadaan aset tetap yang telah dilakukan pemerintah daerah membuat pemerintah daerah bisa saja menjadi mengabaikan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah sehingga saat adanya kelemahan pada alokasi belanja modal menjadi seolah tidak terlihat. Hal ini dapat membuat pemerintah daerah akan mengesampingkan melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dengan semestinya.

Belanja modal yang meningkat atau menurun tidak akan mempengaruhi jumlah kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Belanja modal yang tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota ini disebabkan karena tidak terdeteksi adanya tindak korupsi atau kolusi oleh pejabat daerah, DPRD, dan pengusaha yang dapat meningkatkan jumlah kasus kelemahan pengendalian internal.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan bahwa seringkali belanja modal menjadi obyek kecurangan sehingga kelemahan pengendalian internal yang terjadi dalam pemerintah daerah akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau tidak banyak terjadi kasus kecurangan seperti korupsi dana APBD khususnya terhadap anggaran belanja modal pemerintah. Sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerahnya dengan baik pula dengan cara mengelola anggaran khususnya belanja modal seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan dan penurunan belanja modal tidak mempengaruhi terjadinya kasus kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh iqbal (2017). Alawiyah *et al.*, (2020), Dini *et al.*, (2020), dan penelitian Aini (2017) dimana belanja modal tidak mempunyai pengaruh pada kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan Adha *et al.*, (2019) dan Safitri dan Kiswanto (2019) yang menyatakan belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif pada kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan tabel 9 hasil uji penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien sebesar 18,485 dan *p-value* sebesar 0,043. Hasil tersebut menunjukkan *p-value* sebesar 0,043. yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 5 (H5) dapat diterima. Hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sedangkan nilai koefisien bernilai positif sebesar 18,485 yang mengindikasikan hubungan searah, artinya peningkatan pendapatan asli daerah diikuti dengan peningkatan kelemahan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.

Hasil penelitian menerangkan semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah bisa membuat masalah kelemahan pengendalian internal semakin banyak. Timbulnya banyak kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah bisa disebabkan karena besarnya PAD yang masuk, sebab dapat berpotensi mendorong para pengelola melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang membuat jumlah temuan kelemahan pengendalian intern di pemerintah daerah semakin meningkat.

Dalam teori keagenan pihak agen atau pemerintah daerah telah diberikan kepercayaan oleh prinsipal untuk dapat mengelola daerah dengan baik, namun sebagai pihak pengelola daerah mereka dapat memanfaatkan posisinya tersebut untuk kepentingan pribadi atau tidak mementingkan kepentingan *principal*/masyarakat, apalagi bila adanya pendapatan yang besar cenderung dapat terjadinya penyelewangan sehingga dapat meningkatkan kasus kelemahan pengendalian internal pada pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan Iqbal (2017), Pamuji (2017), Majid *et al.*, (2017) menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Namun hal ini tidak sejalan dengan Putri dan Mahmud (2015), Alawiyah *et al.*, (2020) dan Sutomo (2018) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

SIMPULAN

Dengan adanya hasil penelitian maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh kompleksitas daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2022. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kompleksitas daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Jika kompleksitas daerah meningkat maka kelemahan sistem pengendalian internal akan meningkat.
2. Terdapat pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2022. hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.
3. Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2022. hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.
4. Tidak terdapat pengaruh belanja modal terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2022. hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya belanja modal daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.
5. Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kelemahan sistem pengendalian internal

pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2013-2022. hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka kelemahan sistem pengendalian internal akan meningkat.

KETERBATASAN DAN SARAN

Studi pada penelitian ini hanya dilakukan pada kab/kota di provinsi riau. bisa saja hasilnya berbeda ketika digunakan daerah lain. Sebab perbedaan daerah akan memberikan perbedaan pada pengaruh kelemahan sistem pengendalian internalnya. Rentang waktu penelitian yang singkat yaitu dari tahun 2013-2022. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 5 variabel independen, sehingga masih banyak faktor lain yang masih perlu di uji pengaruhnya terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah. Sebab variabel dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor yang mempengaruhi variabel dependen kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Fitriatul. (2017). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah “. *UNRI. Riau*.
- Andesti, M. & Agustin, H. (2022). “Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah”. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4 (1), 131-149.
- Alawiyah, T. T., Sumardjo, M., & Darmastuti, D. (2020). Analisis Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 415–424. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.397>
- Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan. <http://www.bpk.go.id>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi Indonesia. <http://www.bps.go.id>.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas diponegoro
- Hartono, R., A. Mahmud dan N. S. Utaminingsih. (2014). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KelemahanPengendalian Internal Pemerintah Daerah”. *Procedding Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram. Lombok. Halaman: 1-13
- Iqbal, M., Tanjung, A. R., & Supriono. (2017). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan kota provinsi riau dan sumatera barat). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 881–895. <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12584>
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Stucture*. *Journal of Finalcial Economis* 3. 305- 360.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). “Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864-874.
- Kiswanto, Hajawiyah, A., & Lazty Mahera, Y. (2020). Factors Influencing the Weaknesses of Internal Control of Local Governments in Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 122- 129. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8118>
- Mahyus. (2016). Determinan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Barat. *Eksos*, 13(2), 112–131.
- Majid, Abdul. Hj. Rr.Titiek Herwanti. Nur Fitriah. 2017. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia)”. *Jurnal Magister Manajemen*.

- Novilia, Fitri. 2017. “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal terhadap Temuan Audit BPK Atas Sistem Pengendalian intern pada pemerintah Daerah Di Indonesia”.
- Pamuji, Fahrani Arif. (2017). “Pengaruh Size, Pad, Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah”. UMS. Surakarta
- Pasha, F. S. (2022). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Ukuran Entitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Saat Pandemi Covid-19”(Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Putri, N. K., & Makhmud, A. (2015). “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran Dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemda”. *Accounting Analysis Journal*, 4(2).
- Rachmawati, D. E., & Handayani, N. (2016). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1).
- Saferi, M., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 22342249. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.209> *Eksplorasi*
- Safitri, S.A ., & Kiswanto. 2019. Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Determinan Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Equilibria Pendidikan*, 4(1), 1–9. Subowo, Triono.
2020. Peran Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dalam Memoderasi Faktor Kelemahan Sistem Pengendalian Internal. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(1): 43-54
- Saputro, E. A. (2015). “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah”. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–9.
- Subowo, Triono. 2020. “Peran Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dalam Memoderasi Faktor Kelemahan Sistem Pengendalian Internal”. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(1): 43-54
- Sukirno, Sadono. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi ke-3. Rajawali
- Teysia, Gani Mardatilla (2019) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Untuk Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah